

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai tata cara pengelolaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Secara umum tahapan pengelolaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sebagai pembantu pengelola yang penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah adalah mengenai tahap perencanaan kebutuhan dan pnganggaran, tahap pengadaan, tahap penggunaan, tahap pemusnahan. Tahap penghapusan, tahap penatausahaan dan tahap pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Sedangkan tahapan pengelolan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah adalah meliputi tahap pemanfaatan, tahap pengamanan dan pemeliharaan, tahap penilaian dan tahap pemindahtanganan. Dalam hal ini karena pada Dinas Kesehatn Kabupaten Malaka masih menggunakan Peraturan yang lama yaitu peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka agar dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah dapat dilakukan secara maksimal, Dinas Kesehatan juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pengelolaan yang belum optimal seperti pada tahap pemanfaatan, tahap pengamanan dan pemeliharaan, tahap penilaian dan tahap pemindahtanganan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih menguasai teori pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Aset Tetap dan menambah bentuk proses pengelolaan aset yang tidak hanya berfokus pada aset tetap daerah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima Sugiama. (2013). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama, Bandung: Guardaya Intimarta.
- Agustina, E. dan Rani, U. 2020. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 4(4) : 392-400
- Dewi, A. dan Nugraheni, A. 2020. *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* 4(3) : 761-776
- Hasan, W. 2019. *Sistem Pengelolaan Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2(1) : 27-38
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. (2008). *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kedua Belas, Erlangga, Jakarta
- Rahmat Hidayat., & Ratna, Sari Dewi. 2017. *Akuntansi keuangan menengah I*, Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Monika Sutri Kolinug, dkk. 2015. *Analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah*.*Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*. ISSN: 2303-1174, Vol. 3, No.1, Hal. 818-830.
- Muchlis, I. A. S. & M. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016*. *ASSETS*, 7(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). *Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 152–165.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.